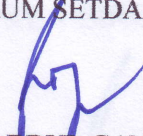


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Organisasi : Biro Hukum Setda Provinsi NTB
2. Tugas : Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan bahan/ materi perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Peraturan Perundang- Undangan Provinsi, Peraturan Perundang- Undangan Kabupaten/Kota, dan Bantuan Hukum.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan bahan/ materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Hukum
 - b. Perumusan penyusunan rencana/program kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Hukum
 - d. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif, pembinaan, serta pelaporan di bidang Hukum
 - e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran dan Sumber Data)
1.	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Berkualitas	- Formulasi Pengukuran = Jumlah Perda Masuk tahun ini dibagi Jumlah Perda yang Terbentuk dikali 100 % - Tipe Pengukuran Target = Kuantitatif dan Kualitatif - Sumber Data = Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota
		Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	- Formulasi Pengukuran = Jumlah Kasus-kasus Hukum yang Masuk tahun ini dibagi Jumlah Kasus yang terselesaikan dikali 100% - Tipe Pengukuran Target = Kuantitatif - Sumber Data = Bagian Bantuan Hukum

Mataram, 2021
KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB,


H. RUSLAN ABDUL GANI, SH. MH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 199303 1 135